

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persoalan nilai pada umumnya memiliki keterkaitan dengan akhlak, moral atau karakter (Helzer et al., 2014; Sanusi, 2015, hlm. 14). Karakter memiliki kesamaan makna dengan *akhlak*. Walaupun disadari pasti terdapat perbedaan dari kedua term tersebut. Di antara perbedaannya, nilai *akhlak* bersumber pada tuntunan agama yang berdasarkan pada kitab suci, sehingga nilai *akhlak* dapat dikelompokkan pada nilai absolut yang menuntut untuk ditaati oleh pemeluk agama Islam pada khususnya. Sementara nilai karakter tidak harus didasari dari kitab suci agama tertentu. Pendidikan karakter bisa didasarkan pada pemahaman manusia. Nilai karakter ditinjau dari keberlakuan nilai, dapat dikelompokkan dalam nilai universal.

Pendidikan karakter dan pendidikan akhlak pada hakekatnya adalah inti pendidikan dari semua jenis pendidikan, yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran (Sauri, 2016, hlm.169). Nilai agama penting ditanamkan sejak usia dini (Sapendi, 2015). Sedangkan nilai karakter ditinjau dari keberlakuan nilai, dapat dikelompokkan dalam nilai universal.

Pada empatbelas abad yang lalu, umat manusia telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentang pentingnya pendidikan karakter (*akhlak*) (Hermawansyah, 2015). Manusia dapat dinilai berakhlak baik apabila memenuhi standar manusia yang berakhlak mulia. Namun tidak semua yang dinilai berakhlak baik dapat dinilai berakhlak mulia. Seperti seorang muslimah yang tidak menggunakan jilbab pada tempat umum dapat dikatakan berakhlak “baik” jika bertingkah laku baik kepada orang lain, tetapi tidak dapat dinilai berakhlak mulia karena tidak menutup aurat. Sedangkan menutup aurat merupakan salah satu

dari tuntunan agama Islam. Pendidikan karakter (*akhlak*) akan mengantarkan manusia sehingga berbudi pekerti (berakhlak) mulia (Sauri, 2013, hlm. 4).

Melalui Pendidikan agama Islam, diharapkan nilai-nilai karakter dapat diinternalisasikan (Rakhmawati, 2013a). Sehingga membawa peserta didik pada pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Demikianlah rancangan pendidikan karakter (moral) yang disebut oleh Lickona (1993), sebagai *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*.

Dalam ungkapan bahasa Sunda Jawa Barat, pendidikan karakter merujuk pada adanya kesesuaian antara *tekad-ucap-lampah* (niat-ucapan-perbuatan) (Mulyasa, 2014, hlm.1). Karena itulah, semua matakuliah yang dipelajari oleh peserta didik diharapkan bermuatan pendidikan karakter yang bisa membawanya menjadi manusia yang berkarakter.

Sesuai dengan konsep skular, bahwa agama adalah hasil pemikiran manusia, nilai-nilai agama disejajarkan dengan nilai-nilai ekonomi, politik, pengetahuan, susila, dan sebagainya. Akibatnya nilai-nilai itu berkembang dalam kelompoknya masing-masing, terlepas dari kelompok-kelompok lainnya. Sebaliknya, ada pemahaman, bahwa nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial, nilai pengetahuan, nilai susila, dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dari agama (Nasution, 1998, hlm. 289). Bahkan agama seharusnya menjadi basis nilai dari berbagai dimensi kehidupan.

Dalam Desain Induk Pembangunan karakter bangsa pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni tahap I: 2010—2014, merupakan fase konsolidasi dan implementasi dalam rangka penyadaran pentingnya pembangunan karakter, peningkatan komitmen terhadap kebangsaan Indonesia, serta peningkatan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tahap II: 2014—2020, merupakan fase pematapan strategi dan implementasi ; pada tahapan ini diprioritaskan pada pengukuhan nilai etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga implementasinya terwujud akhlak mulia secara individu, keluarga maupun masyarakat. Tahap III: 2020—2025. Merupakan fase pengembangan berkelanjutan dari hasil yang telah dicapai pada tahap I dan tahap II (Kemendiknas, 2010, hlm. 15).

Kementerian Pendidikan Nasional melalui Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, memberikan arahan agar pendidikan karakter diinternalisasikan melalui: 1) integrasi dalam matakuliah, 2) integrasi dalam muatan lokal, 3) kegiatan pengembangan diri. (Kemendiknas, 2011, hlm.14), Sebagaimana tabel 1.1:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Internalisasi Pendidikan Karakter

| NO | IMPLEMENTASI | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Integrasi dalam matakuliah | Mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan. |
| 2 | Integrasi dalam muatan lokal | Kompetensi dikembangkan oleh Satuan Pendidikan/Daerah. |
| 3 | Kegiatan pengembangan diri | Pembudayaan dan Pembiasaan: Pengkondisian. Kegiatan rutin. Kegiatan spontanitas. Kegiatan terprogram. Keteladanan. Ekstrakurikuler: Olah raga, seni, pramuka, dll. Bimbingan konseling. |

Sumber: Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Kementerian Pendidikan Nasional (2011).

Proses internalisasi nilai-nilai karakter pada suatu lembaga pendidikan akan berbeda dengan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter pada lembaga pendidikan yang lain, walaupun memiliki tujuan yang sama yakni terbentuknya akhlak mulia pada peserta didik (Lisnawati, 2016). Akhlak mulia merujuk pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menurut hasil penelitian (Sauri dan Nurdin, 2008, hlm. 1) menunjukkan bahwa di antara generasi muda banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai sosial, tawuran, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, tidak disiplin, kurang empati, berbahasa tidak santun. Fenomena kehidupan seperti ini, menghadapkan orang tua, guru dan masyarakat pada tantangan yang sangat kompleks dalam menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai positif lainnya kepada generasi muda harapan bangsa.

Terjadi beberapa kasus karakter yang dapat dinilai tidak sesuai dengan akhlak mulia karena melanggar nilai karakter religius dan nilai karakter nasionalis. Seperti kasus lesbian(Nurdiyana¹, Azriful² & 1, 2015), gay(Koeswinarno, 2017), bisexual(Setiawati, 2017), transgender(Clarke, Cover, & Aggleton, 2018). Komunitas LGBT jika ditinjau dari hak asasi manusia (HAM), bukan merupakan pelanggaran hukum karena tidak dilakukan dengan paksaan dan merupakan kebebasan dalam bertindak sesuai dengan hati nurani pelaku. Oleh karena itu, terdapat beberapa negara yang melegalkan LGBT setelah mendapat tuntutan dari masyarakatnya, seperti 1) Belanda, pada tahun 1996 melegalkan pernikahan sejenis. 2) Belgia, pada tahun 2003 melegalkan pernikahan sejenis, 3) Spanyol, pada tahun 2005 melegalkan perkawinan sejenis walau ditentang oleh gereja Katolik. 4) Kanada, pada tahun 2005 mengesahkan pernikahan gay. 5) Afrika Selatan, memberi hak kepada kaum LGBT untuk menikah secara resmi pada tahun 2006. 6) Norwegia, pada tahun 1993 membolehkan pernikahan sejenis di luar gereja dan mendapat restu dari Pendeta(SindoNews.com, 5 februari 2016). Negara Republik

Indonesia memiliki karakter bangsa berbasis pada nilai agama, tidak membenarkan LGBT. Sehingga sampai saat ini, dan semoga selamanya Negara Republik Indonesia tidak melegalisasi LGBT dan moral lain yang tidak dibenarkan oleh agama.

Kasus penistaan agama, merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dan wujud akhlak yang tidak mulia. Karena tidak menjaga kesantunan dalam berbahasa. Terjadi beberapa kasus berkaitan dengan penistaan agama, seperti : 1) Pada 1990-an, kasus penistaan agama dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto, mengakibatkan Arswendo ditangkap dan divonis lima tahun penjara. 2) Lia Eden, divonis dua tahun penjara. 3) Ahmad Musadek, pada tahun 2005 divonis dua tahun penjara. 4) pada tahun 2016 Rusdiani, yang mengatakan tempat sesaji umat Hindu itu sangat kotor divonis satu setengah tahun penjara. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) ketika di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 telah menistakan agama Islam. Dengan kategori : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum (www.kiblat.net/2016/10/11). Penghinaan terhadap kitab suci dan ulama yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI saat itu (Ahok), merupakan salah satu contoh pengabaian nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa.

Menurut Sauri (tt, hlm.15) bahasa santun merupakan salah satu bahasan pendidikan umum yang dapat dijadikan sebagai jembatan pertama untuk memahami makna yang mendasar pada tujuan, peran dan fungsi pendidikan umum melalui nilai-nilai agama. Dengan demikian, Pendidikan umum dapat dipadankan dengan pendidikan nilai (Pendidikan Umum/Pendidikan Nilai). Ucapan dan perilaku santun merupakan salah satu gambaran dari manusia utuh yang menjadi tujuan pendidikan umum, yaitu manusia yang berkepribadian (Sumaatmadja, 1980, hlm.18).

McConnell (dalam Sauri, 2009) berpendapat, bahwa Pendidikan Umum berfungsi untuk mempersiapkan generasi muda dalam memasuki kehidupan secara

memuaskan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang bersifat pribadi dan sosial agar dapat hidup layak pada waktunya (Gaff & Wasescha, 2001; Orillion, 2009; Eder, 2004). Pendidikan umum sebaiknya melahirkan manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan berkomunikasi, membuat keputusan-keputusan dan penilaian yang cerdas dan bijaksana, dan untuk mengevaluasi situasi moral, serta mampu bekerja secara efektif pada tujuan yang baik.

Kesuksesan pendidikan tidak hanya ditentukan pada kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skills*) saja (Lumague, 2017). Tetapi kesuksesan proses pendidikan juga ditentukan pada kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Bahkan menurut Pupuh Fathurrohman, penelitian menunjukkan bahwa *hard skill* menunjang kesuksesan pendidikan sebesar 20 %, sedangkan *soft skill* menunjang kesuksesan pendidikan sebesar 80% (Fathurrohman, dkk. 2013, hlm.4). Pendidikan karakter yang dilaksanakan diharapkan dapat menyeimbangkan kemampuan peserta didik dalam *hard skill* dan *soft skill* (Patacsil & Tablatin, 2017). Karena kedua keterampilan tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk dikembangkan.

Pendidikan yang tidak berbasis pada pendidikan agama, akan menilai kebaikan hanya pada pertimbangan rasio saja, seperti mereka yang mengabaikan ibadah tetapi bermoral baik dengan sesama manusia, maka dapat dinilai berkarakter baik. Kecenderungan pertimbangan nilai melalui akal lebih dominan jika dibanding dengan pertimbangan nilai melalui agama, yang terkadang tidak rasional. Pendidikan yang tidak berbasis pada nilai agama akan menghasilkan alumnus yang mudah kehilangan orientasi kehidupan nyata, keilmuan yang tidak bermanfaat dan bermakna (*meaningless knowledge*) sehingga justru menjadi beban hidup (Veal, 2017).

Pada masyarakat modern dijumpai beberapa penyakit yang perlu disembuhkan, diantaranya: *pertama*, disintegrasi antar ilmu pengetahuan karena spesialisasi yang terlalu kaku. Disadari spesialisasi penting, tetapi jika berlebihan akan mengakibatkan individualistik dan pengabaian kebenaran ilmu pengetahuan

yang lain. *Kedua*, kehidupan yang rasionalistik sehingga mendangkalkan keimanan pada yang ghaib, karena tidak dapat dipahami hanya dengan rasio/akal. *Ketiga*, kehidupan yang materialistik karena mengukur keberhasilan atau kesuksesan hanya dari sisi kuantitas materi. *Keempat*, kehidupan yang hedonis sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan menghalalkan berbagai macam cara tanpa mempertimbangkan nilai. Kelima, mudah stres dan prustasi karena menghadapi problematika kehidupan yang tidak didasari dengan kekuatan keimanan pada *taqdir*/ketentuan Tuhan dan *tawakkal* (Nata, 2003, hlm.83).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjiwai semua bidang pembangunan. Salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa. Sistem nilai yang berakar pada Pancasila, meliputi 1) nilai Ketuhanan, 2) nilai Kemanusiaan, 3) nilai Persatuan bangsa, 4) nilai Permusyawaratan, 5) nilai Keadilan.

Pada masa pemerintahan orde baru internalisasi nilai-nilai Pancasila sering dilakukan dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa, adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Panduan P4 dibentuk melalui ketetapan MPR no II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas pada Pancasila menjadi 36 butir sebagai pedoman pelaksanaan praktis dalam mengamalkan Pancasila. Seiring dengan berjalannya waktu, ketetapan MPR no II/MPR/1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan menurut ketetapan MPR no I/MPR/2003 sudah dianggap bersifat final atau selesai dilaksanakan.

Kemendiknas (2010, hlm. 9), telah mengidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: 1)

religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) tanggung jawab. Kedelapanbelas nilai-nilai karakter tersebut, penting untuk diinternalisasikan melalui semua matakuliah, khususnya matakuliah Agama Islam, sehingga nilai-nilai karakter yang diinternalisasikan berbasis pada nilai agama Islam. Presiden Republik Indonesia yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pendidikan karakter pada tanggal 2 Mei 2010. Dalam implementasinya, Kemdikbud membuat rencana aksi nasional pendidikan karakter dari tahun 2010 hingga tahun 2025 (Mulyasa, 2014, hlm.256).

Secara konstitusional ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada agama. Maksudnya, bahwa negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama seluruh warga negara Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Indonesia adalah Negara yang beragama, bukan Negara yang tidak mengenal agama (*atheis*).

Mata kuliah Pendidikan Agama merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semua jenis Pendidikan. Hal ini berdasarkan pada pasal 39 ayat 2 UU no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Agama. Bobot mata kuliah ini adalah 2 (dua) SKS dan merupakan rumpun Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), selain Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama termasuk dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar, sumber nilai dan pedoman

pembentukan kompetensi program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (SK. Dirjen Dikti pasal 1). Menindak lanjuti KepMen Nomor 232 dan 045 tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan SK Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian (RRPM) di Perguruan Tinggi.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian utuh dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sedangkan misi Pendidikan agama adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk penyediaan layanan pendidikan dan pengembangan pendidikan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada jenis investasi lainnya (Suryadi, 2016, hlm. 348). Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan diberikan pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan karakter. Disamping lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendidikan karakter.

Negara Republik Indonesia bukan negara agama, tetapi melalui sila yang pertama dari Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus beragama dengan meyakini adanya Tuhan yang maha Esa, bahkan pada kartu tanda penduduk (KTP) terdapat kolom agama. Hal ini menunjukkan bahwa identitas bangsa Indonesia tidak lengkap jika tidak memiliki agama. Walaupun sempat

terwacanakan penghilangan kolom agama pada KTP, tetapi Alhamdulillah sampai saat ini kolom agama masih ada pada KTP.

Melalui pembinaan pada matakuliah agama, diharapkan dapat membentuk akhlak mulia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tidak menjamin membuat seseorang dapat mengamalkan ilmunya sehingga menjadi kepribadian yang mencerminkan karakter bangsa. Dibutuhkan pengamalan (*implementasi*) pendidikan karakter agar terbentuk mahasiswa yang berakhlak mulia.

Internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama memiliki posisi yang penting dan strategis dalam menyiapkan generasi bangsa yang unggul. Bangsa yang berkarakter akan dapat menyeleksi berbagai budaya yang datang, baik dari dalam atau dari luar negeri. Budaya yang tidak berkesesuaian dengan nilai agama, diupayakan agar dapat ditinggalkan, sementara budaya yang berkesesuaian dengan nilai agama agar dilestarikan.

Kebijakan Nasional pembangunan 2010 – 2025 berfokus pada tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. Dalam Desain Induk pembangunan karakter bangsa, dirumuskan bahwa karakter bangsa kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, olah karsa dan olah raga. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen pada NKRI (Kemdiknas, 2010, hlm. 3).

Bangsa Indonesia memiliki jati diri yang khas, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan jati diri negara lain. Jati diri bangsa Indonesia perlu ditumbuhkan dan diperkuat melalui pendidikan karakter bangsa. Sebagai negara yang memiliki keragaman suku, bahasa dan agama, maka pendidikan karakter bangsa diarahkan pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan upaya membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan berwibawa di mata dunia, melalui pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang sesuai dengan karakter bangsa.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dikukuhkan wajib adanya mata kuliah pendidikan agama, yang sudah dapat dipastikan merupakan suatu entitas utuh psikopedagogis / andragogis dalam kurikulum program diploma dan sarjana. Matakuliah wajib umum (MKWU) terdiri empat matakuliah, yaitu: 1) Pendidikan Agama 2) Pendidikan Pancasila 3) Pendidikan Kewarganegaraan, 4) Pendidikan Bahasa Indonesia. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 94190/MPK/MS/2012 tertanggal 28 September 2012 bahwa memperhatikan situasi pendidikan akhir-akhir ini yang diwarnai oleh tindak kekerasan di lingkungan sekolah/kampus dan untuk mengantisipasi ini agar tidak berkembang sehingga mengganggu kelangsungan proses pendidikan secara lebih luas maka setiap pimpinan perguruan tinggi untuk segera melakukan upaya memperkuat pendidikan karakter baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Perguruan tinggi mendapatkan tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan pada saatnya dapat meluluskan sarjana yang bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan Negara Indonesia. Alumni perguruan tinggi, diharapkan mampu memerankan fungsinya sebagai agen pembaharu dalam masyarakat (*agent of social change*).

Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan pendidikan karakter. Demikian pula dengan Universitas Tanjungpura sebagai Perguruan Tinggi Negeri secara resmi mengimplementasikan Program Pendidikan Karakter melalui Keputusan Rektor Nomor 1540 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian Pendidikan Karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama pada Universitas Tanjungpura yakni:

1. Mengintegrasikan Pendidikan Karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2. Menetapkan Pendidikan Karakter berbobot 1 (satu) SKS sebagai bagian dari Mata Kuliah Pendidikan Agama yang berbobot 3 (tiga) SKS
3. Menetapkan Pendidikan Karakter sebagai syarat kelulusan Mata Kuliah Pendidikan Agama.
4. Menetapkan Pendidikan Karakter wajib diikuti oleh mahasiswa baru dan mahasiswa lama Universitas Tanjungpura yang mengulang Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester ganjil setiap tahun ajaran.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1540 Tahun 2012, maka pelaksanaan pendidikan karakter mahasiswa diintegrasikan dalam matakuliah agama. Karena mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak memeluk agama yang heterogen, maka pembinaan pendidikan karakter diselenggarakan sesuai dengan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk mengikuti perkuliahan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianut. Demikian pula, sebaliknya diwajibkan setiap mahasiswa untuk mengambil program matakuliah agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Sehingga pada Universitas Tanjungpura terdapat enam bentuk pembinaan karakter, yakni; 1) pembinaan karakter sesuai dengan agama Islam, 2) pembinaan karakter sesuai dengan agama Kristen Protestan, 3) pembinaan karakter sesuai dengan agama Katolik, 4) pembinaan karakter sesuai dengan agama Hindu, 5) pembinaan karakter sesuai dengan agama Budha, 6) pembinaan karakter sesuai dengan agama Kong Hu Cu.

Kata agama sudah digunakan sejak zaman Kahuripan di saat dipimpin oleh Raja Erlangga, kemudian berkembang sampai selat Malaka pada zaman Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kata Agama berasal dari bahasa Sangsekerta, gabungan dari dua kata, yakni kata “a” yang berarti “tidak” dan kata “gama” yang berarti “kacau”. Jika dipadukan, maka agama berarti tidak kacau.

Agama dapat dipahami sebagai kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu yang ghaib, maha kuasa, maha suci, maha agung dan berupa ajaran-ajaran yang berasal dari orang-orang suci (Nabi dan Rasul) serta ritual (Sauri, Firmansyah dan Rizal. 2010. hlm.115).

Secara umum, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sedangkan menurut Hardiyanto, dkk (2010, hlm.14) dalam Standart nasional pendidikan agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi umum (PTU), tujuan matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) pendidikan agama Islam pada PTU adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dalam diri mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ayat kauniyah dan ayat qauliyah.
2. Memperkokoh karakter muslim dalam diri mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan norma-norma Islam dalam melakukan relasi yang harmanis dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya.
3. Mengembangkan pemikiran dan akhlak yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
4. Mengantarkan mahasiswa agar mampu bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia.
5. Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan penalaran yang benar dan baik serta berfikir kritis dalam memahami berbagai masalah aktual dan menyikapinya dengan perspektif Islam.

Menurut Zakiah Derajat (2001, hlm.171), pendidikan agama adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama. Sedangkan menurut kurikulum 2004 pendidikan agama memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: 1) pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama; 2) pendidikan agama bertujuan untuk

Baidhillah Riyadhi, 2019

INTERNALISASI NILAI-NILAI KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MEMBINA AKHLAK MULIA PADA UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan agama menjadi persyaratan mutlak bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan jenjang Perguruan Tinggi (PT). Semua jenjang pendidikan baik negeri atau swasta, memiliki tanggung jawab moral dalam pendidikan dan pembinaan karakter peserta didik. Pada Perguruan Tinggi, secara informal, matakuliah Pendidikan Agama memiliki tugas dalam pembinaan karakter mahasiswa. Walaupun bukan berarti bahwa matakuliah selain Pendidikan Agama, tidak memiliki tugas dalam pembinaan karakter mahasiswa. Pendidikan karakter merupakan *hidden* kurikulum pada semua matakuliah.

Mahasiswa berada pada posisi pemuda yang produktif dan penuh dengan potensi, pada masa muda terkumpul potensi yang besar, sehingga Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar memanfaatkan usia muda dengan sebaik-baiknya sebelum datang usia tua. Pada tangan dan kaki generasi muda harapan kejayaan suatu bangsa. Jika pada suatu negara para pemudanya memiliki akhlak yang mulia, karakter yang kuat dan pikiran yang cerdas, maka pada masanya akan terwujud negara yang merdeka, adil dan makmur (*baladatan thoyyibah*). Sebaliknya jika para pemudanya berakhlak tidak mulia, berkarakter lemah dan kurang berfikir cerdas, maka akan berakibat fatal. Disinilah pentingnya penanaman nilai-nilai karakter pada mahasiswa, sehingga diharapkan terbina mahasiswa yang berakhlak mulia.

Panduan pelaksanaan pendidikan karakter telah disusun oleh pemerintah RI melalui Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, merumuskan 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai karakter tersebut, penting untuk diinternalisasikan pada semua jenjang pendidikan dan satuan pendidikan.

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa, pada tanggal 6 desember 2016 Presiden Joko Widodo menanda

tangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Revolusi itu mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur dan bupati/wali kota. Dalam mengambil langkah-langkah itu, menurut Inpres tersebut, berpedoman kepada 5 program Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu: 1) Program Gerakan Indonesia Melayani, 2) Program Gerakan Indonesia Bersih, 3) Program Gerakan Indonesia Tertib, 4) Program Gerakan Indonesia Mandiri, 5) Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Terminologi Revolusi Mental pertama kali digunakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 ketika revolusi nasional sedang berhenti. Gerakan itu bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Semangat tersebut kini berusaha untuk diimplementasikan sesuai kondisi saat ini oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa. Nilai-nilai esensial itu meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif, adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Revolusi mental merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Revolusi Mental, menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Revolusi mental bertujuan untuk mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti. Pertama, Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik. Kedua, mandiri secara ekonomi, dan Ketiga, berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul mengedepankan nilai-nilai integritas, kerja keras dan semangat gotong royong. Pada nilai integritas akan mewujudkan nilai jujur, nilai dapat dipercaya dan nilai tanggung jawab. Pada nilai kerja keras, akan menghasilkan nilai etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif. Pada nilai Gotong royong akan menghasilkan nilai kerja keras, solidaritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Budhiman, 2017)

Gambar : 1.1 Nilai-nilai karakter utama



Sumber: Arie Budhiman (2017)

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari gerakan revolusi mental bukanlah perbuatan yang mudah. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran kolektif dan aksi bersama baik dari pihak pemerintah dan dari pihak rakyat Indonesia. Disamping itu, dibutuhkan waktu dan dewan pakar yang memikirkan strategi yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam revolusi mental sehingga dapat dirasakan hasilnya. Sementara ini, gerakan revolusi mental masih belum dapat terlihat hasil yang maksimal. Karena masih banyak nilai-nilai karakter yang terabaikan, sehingga dapat dinilai belum berakhlak mulia. Seperti masih banyak orang yang menggunakan lisannya secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai berbangsa. Akibatnya terjadi pertentangan dan perselisihan dikalangan masyarakat (Sauri, 2006, hlm.9).

Konflik semakin terasa di kalangan masyarakat, saat seorang publik figur yang menggunakan kata-kata yang tidak santun, menyinggung perasaan orang lain, yang berkaitan dengan suku, agama atau hal-hal lain. Orang tua diharapkan dapat mengajarkan bahasa santun kepada anak (Zuhrudin, 2017). Guru diharapkan dapat mengajarkan bahasa santun kepada murid (Rakhmawati, 2013b). Komunikasi konselor yang efektif membutuhkan pemilihan kata yang santun (Ristiyan, 2016). Menurut Lickona (1992 hlm.18), terdapat beberapa indikator dari kemunduran moralitas; a) kekerasan dan tindakan anarki. b) pencurian. c) tindakan curang. d) pengabaian terhadap aturan yang berlaku. e) tawuran. f) ketidaktoleranan. g) penggunaan bahasa yang tidak baik. h) kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. i) sikap perusakan diri. Dengan demikian, penggunaan kata-kata yang tidak santun merupakan salahsatu dari indikator mundurnya moralitas. Menurut Sauri (2006, hlm. 79-86) dalam Al Qur'an terdapat enam tuntunan berbahasa santun, yaitu: *qaulan sadida*(Qs.33:70), *qaulan ma'rufa*(Qs.2:235), *qaulan baligha*(Qs.4:63), *qaulan maysura*(Qs.7:28), *qaulan layyina*(Qs.20:44) dan *qaulan karima*(Qs.17:23). Senada dengan Sauri, komunikasi santun dalam Al Qur'an juga diungkapkan oleh Zahid pada jurnal Karsa STAIN Pamekasan (Zahid,

2013). Berbahasa santun merupakan salah satu indikator bagi seseorang yang berakhlak mulia.

Melalui gerakan nasional revolusi mental, diharapkan dapat terbina nilai-nilai utama, yaitu: Relegiusitas, Nasionalisme, Integritas, Kemandirian dan Gotong-royong. Dengan demikian, diharapkan kesembilan indikator dekadensi moral yang disampaikan oleh Lickona dapat dihindarkan. Nilai-nilai karakter utama tersebut, pada dasarnya telah termuat dalam pendidikan agama Islam. Apabila diinternalisasikan melalui pendidikan agama Islam, maka diharapkan akan terbina mahasiswa yang berakhlak mulia.

Sesuai dengan judul disertasi dan latar belakang, maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang “internalisasi nilai-nilai karakter melalui matakuliah agama Islam untuk membina akhlak mulia pada Universitas Tanjungpura Pontianak”. Nilai-nilai karakter yang akan diinternalisasikan melalui PAI mengacu pada nilai-nilai utama yang telah dirumuskan oleh Gerakan Nasional revolusi mental, yakni; Relegiusitas, Nasionalisme, Integritas, Kemandirian dan Gotong-royong. Pelaksanaan pendidikan karakter di Universitas Tanjungpura dinilai menarik dan patut untuk diteliti. Ketertarikan peneliti memilih Universitas Tanjungpura sebagai lokasi penelitian dengan alasan, sebagaimana berikut:

- 1) Universitas Tanjungpura adalah perguruan tinggi tertua dan terbesar di provinsi Kalimantan Barat. Universitas Tanjungpura memiliki 9 Fakultas, Terdiri dari 96 Program Studi. 6 Diploma, 63 S1, 22 S2, 2 S3, 3 Profesi. Jumlah seluruh mahasiswa Universitas Tanjungpura sebanyak 30.687 mahasiswa yang tersebar di sembilan fakultas.
- 2) Berdasarkan surat keputusan Rektor, pelaksanaan pendidikan karakter diintegrasikan dalam mata kuliah agama, sehingga mahasiswa Universitas Tanjungpura wajib mengikuti pendidikan karakter.
- 3) Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan karakter Universitas Tanjungpura. Sehingga, koordinator umum pendidikan karakter Universitas Tanjungpura,

dilibatkan dalam Tim Program *Hibah General Education* yang dibentuk oleh Kemenristekdikti.

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan yang ditemukan adalah belum terinternalisasikannya nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam. Seperti masih banyak mahasiswa muslim yang belum mengamalkan syari'at Islam. Berdasarkan dokumen dari hasil kuesioner program pendikar pada tahun 2017, terdapat 83% dari 775 responden mahasiswa sekitar 643 mahasiswa yang mengakhirkan mendirikan sholat sholat fardlu. Padahal shalat fardlu pada awal waktu merupakan keutamaan.

Secara khusus, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah perencanaan internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak ?
- 1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak?
- 1.2.3 Bagaimanakah evaluasi internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak?
- 1.2.4 Bagaimanakah kendala internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam sebagai upaya membina akhlak

mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Kemudian memberikan masukan atau saran yang bermanfaat dalam internalisasi nilai-nilai karakter. Selanjutnya, teori internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam yang ditemukan diharapkan dapat di praktekkan pada perguruan tinggi lain.

Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Sebagaimana berikut:

1.3.1 Mengetahui perencanaan internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.3.2 Mengetahui pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.3.3 Mengetahui cara evaluasi internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.3.4 Mengetahui kendala internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam untuk membina akhlak mulia mahasiswa pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal pendidikan karakter. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1.4.1 Manfaat dari segi teori, dari hasil penelitian ini, akan ditemukan kerangka teoritis tentang internalisasi nilai-nilai karakter melalui matakuliah pendidikan agama Islam, yang dilaksanakan pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

- 1.4.2 Manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini akan bermanfaat bagi pemegang kebijakan dari unsur pimpinan perguruan tinggi yang terkait dalam terlaksananya internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam. Pada Universitas Tanjungpura Pontianak, Program Pendidikan Karakter berdasarkan pada kebijakan Rektor, melalui Keputusan Rektor Nomor 1540 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian Pendidikan Karakter ke dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama. Dengan demikian, maka setiap mahasiswa wajib mengikuti pendidikan karakter yang berbasis pada ajaran agama. Sebab matakuliah agama adalah termasuk dalam matakuliah wajib umum (MKWU). Pendidikan karakter memiliki nilai sks yang terintegrasi dalam jumlah sks matakuliah agama. Adanya kebijakan dari pimpinan sangat bermanfaat bagi implementasi pendidikan karakter melalui matakuliah agama di kampus.
- 1.4.3 Manfaat dari segi praktik, hasil penelitian ini akan dapat memberikan gambaran proses internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan agama Islam sehingga terbina akhlak mulia mahasiswa universitas Tanjungpura Pontianak.
- 1.4.4 Manfaat dari segi isu serta aksi sosial, hasil penelitian ini akan memberikan pencerahan kepada mahasiswa yang beragama Islam agar dapat terbina karakter yang sesuai dengan agama Islam yang diyakini kebenarannya, tanpa mengintervensi ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Sehingga terbina akhlak mulia dan terhindar dari penodaan atau penistaan agama.

1.5 . Sistematika Disertasi

- 1.5.1 Pada bab pertama akan dibahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari sub bab pertama: latar belakang penelitian, sub bab kedua; rumusan masalah, sub bab ketiga; tujuan penelitian, sub bab keempat; manfaat/signifikansi penelitian, dan sub bab kelima; sistematika disertasi.

- 1.5.2 Pada bab kedua akan dibahas kajian pustaka, yang terdiri dari sub bab pertama; perencanaan internalisasi nilai-nilai karakter, sub bab kedua; pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter. Sub bab ketiga; evaluasi pendidikan karakter, sub bab keempat; kendala internalisasi nilai-nilai karakter, sub bab kelima ; Internalisasi nilai-nilai karakter, sub bab keenam ; Nilai-nilai karakter, sub bab ketujuh keterkaitan Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Umum.
- 1.5.3 Pada bab ketiga akan dibahas tentang Metode penelitian. Dengan sub bab pertama; Desain penelitian, sub bab kedua; Partisipan dan tempat penelitian, sub bab ketiga; pengumpulan data, sub bab keempat; analisa data, sub bab kelima; Isu etik Penelitian.
- 1.5.4 Pada bab keempat, akan dibahas tentang Temuan dan pembahasan. Dengan Sub bab pertama gambaran umum lokasi penelitian. Sub bab kedua; Temuan Penelitian, yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Kendala internalisasi nilai-nilai Karakter. Pada sub bab ketiga; tentang pembahasan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Kendala internalisasi nilai-nilai Karakter.
- 1.5.5 Pada bab kelima, akan dibahas tiga sub bahasan, Sub bahasan pertama; Simpulan. Sub bab kedua; Implikasi dan sub bahasan ketiga Rekomendasi.